
POLA JARINGAN POLITIK DINASTI KEPALA DESA DI DESA MERAH MATA KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN

Political Network Patterns Of Village Head Dynasty In Red Mata Village, Banyuasin I District Banyuasin District

M. Ervan Marzuki^{1*}

Aris Munandar²

^{*1} Tamansiswa, Palembang,
Sumatera Selatan, Indonesia

² Tamansiswa, Palembang,
Sumatera Selatan, Indonesia

*email:

ervan_marzuk@yahoo.com

Abstrak

Pola jaringan politik dinasti adalah strategi politik untuk memperoleh kekuasaan melalui pewarisan kepada individu yang memiliki hubungan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola pembentukan jaringan politik dinasti dan dampaknya terhadap perilaku politik masyarakat Desa Mata Merah, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pola tersebut serta dampaknya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola jaringan politik dinasti kepala desa di Desa Mata Merah meliputi: 1) Modal Ekonomi: Kepala Desa Mata Merah memiliki stabilitas ekonomi dan hubungan kekerabatan dengan desa sebelumnya, termasuk dalam politik dinasti. 2) Modal Budaya: Karakter dan kompetensi kepala desa berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. 3) Modal Sosial: Kepala desa memiliki pengaruh sosial yang baik, terlihat dari perannya dalam kegiatan masyarakat. 4) Modal Simbolik: Kepala desa kurang memiliki modal simbolik namun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari politik dinasti di Desa Mata Merah adalah pembatasan kesempatan bagi individu lain yang lebih layak untuk menduduki jabatan kepala desa.

Kata Kunci:

Jaringan,
Dinasti,
Politik,
Keluarga,
Kepala Desa

Keywords:

Networks,
Dynasties,
Politics,
Families,
Village Heads

Abstract

The pattern of dynastic political networks is a political strategy to gain power through inheritance by individuals who have a relationship with the previous holder of power. This research aims to understand the formation patterns of dynastic political networks and their impact on the political behavior of the people in Mata Merah Village, Banyuasin I District, Banyuasin Regency. A qualitative method is used to describe and explain these patterns and their impacts. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research results show that the pattern of dynastic political networks of the village head in Mata Merah Village includes: 1) Economic Capital: The village head of Mata Merah has economic stability and kinship relations with the previous village, which falls under dynastic politics. 2) Cultural Capital: The character and competence of the village head significantly influence decision-making and actions. 3) Social Capital: The village head has good social influence, evident from his role in community activities. 4) Symbolic Capital: The village head lacks symbolic capital but is able to improve the welfare of the community. The impact of dynastic politics in Mata Merah Village is the limitation of opportunities for other more deserving individuals to hold the position of village head.

PENDAHULUAN

Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman orde baru mengajarkan bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan bagi rakyat. Salah satu upaya pemerintah untuk

Menghadapi Peristiwa tersebut yakni melakukan perubahan terhadap UUD 1945 guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, peranan anggota DPR sebagai lembaga legislative diperkuat, anggota-anggota DPR dipilih lewat pemilu, pengawasan terhadap presiden diperketat, dan Hak Asasi Manusia (HAM) memperoleh jaminan.

Demokratis merupakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah di Indonesia telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2005. Semenjak saat itu, semua kepala daerah yang masa jabatannya selesai harus dipilih melalui proses pemilukada guna menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan memberikan hak bagi rakyatnya untuk menentukan kepala daerah. Hal tersebut tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung sebab dipilih melalui DPR. Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam system ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Di Indonesia, demokrasi bukan merupakan sesuatu yang asing jika mengacu pada tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat. Praktik musyawarah-mufakat (asas

kerakyatan) di sejumlah daerah telah berlangsung berabad-abad lamanya, sejak masyarakat hidup dalam sistem perkauman di zaman purba hingga berlanjut di zaman kerajaan-kerajaan sampai saat ini. Tradisi yang hidup dalam masyarakat agraris disebut juga dengan tradisi berembuk, bahkan sudah terlembagakan dalam bentuk yang unik seperti kerapatan nagari, rembug desa, musyawarah subak, dan forum-forum musyawarah masyarakat desa lainnya.

Seorang kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa, dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan kepala desa yakni 6 (enam) tahun berdasarkan ketentuan tata cara pemilihan kepala desa (Pilkades). Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan desa bertugas melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan.

Pesta demokrasi atau pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari pembangunan demokrasi politik yang dimulai di tingkat lokal (Desa). Pemilihan kepala desa juga merupakan ajang dari praktek pemilihan umum (Pemilu) guna memilih seorang calon kepala desa yang dikomandoi oleh BPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang telah memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa ini bersifat

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan.

Desa berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Eksistensi desa memiliki struktur sosial dengan ciri masyarakat yang khas dan latar belakang adat istiadat tersendiri. Desa sebagai institusi sosial memiliki posisi yang sangat penting, otonom dan memiliki hukumnya sendiri sehingga menjadikan eksistensi desa relatif sangat mandiri dan dianggap sebagai perwujudan bangsa yang paling konkrit. Desa pada prinsipnya mempunyai kewenangan atau kegiatan pengaturan, pembinaan, pelayanan, dan pemberian fasilitas pada masyarakat desa. Semua kewenangan yang bersangkutan dalam urusan pemerintahan ditingkat desa tersebut bersifat tugas atau bantuan dari pemerintah pusat, daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan otonomi desa. Dimensi-dimensi pemerintahan menegaskan bahwa pemerintah desa mempunyai urusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya yang secara umum terdapat hubungan dan partisipatif dalam demokrasi atau disebut politik kekeluargaan.

Politik dinasti telah lama muncul di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terbentuknya ketidaksetaraan kekuasaan politik yang bisa mencerminkan ketidaksempurnaan representasi demokratis dalam politik atau disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk ikut serta dalam politik, artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi memperebutkan jabatan-

jabatan politik mulai dari tingkat regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realitasnya, masyarakat masih terhalang oleh status ataupun hak-hak sosialnya sebagai akibat dari adanya fenomena politik dinasti.

Demokrasi memiliki arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sedangkan politik dinasti ini telah menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Hal tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra, ada yang beranggapan bahwa politik dinasti ini baik karena kestabilan politik terjaga tetapi ada pula yang beranggapan bahwa politik dinasti ini hanyalah alat yang digunakan para pejabat untuk memperpanjang masa jabatan atau kekuasaannya. Selain itu dapat mempersempit kesempatan bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam lembaga perpolitikan sebab biasanya calon pemimpin politik dinasti lebih banyak sokongan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Politik dinasti bersebrangan dengan demokrasi. Namun, walaupun sudah era demokrasi tetapi politik dinasti tetap berlaku meskipun sudah ada partai politik atau pemilihan langsung. Istilah “politik dinasti” mengacu pada praktek politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah “dinasti” juga menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah “oligarki politik” dalam studi lain. Pada umumnya, kata “dinasti” berarti keluarga/kelompok atau suku”. Dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia, dinasti berarti anak. Sedangkan

kata “dinasti” lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi sebagai suatu kelompok sosial.

Politik dinasti merupakan serangkaian politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tetapi berada pada pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah dimiliki kepada orang lain yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Terbentuknya politik dinasti disuatu daerah seharusnya dihilangkan sebab politik dinasti merupakan suatu permasalahan yang berdampak pada sistem politik yang ada, terutama pada bagian akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan serta hanya melahirkan sebuah keuntungan untuk satu kelompok kepentingan dan merugikan kelompok lainnya. Jika politik dinasti telah dipersiapkan dengan baik sebelum terjun ke politik dan pemerintahan maka tidak akan menjadi masalah dan justru memberikan suatu ruang tertentu kepada orang lain untuk bergabung. Namun, jika hanya mengandalkan nama besar keluarga dan tak memiliki kompetensi maka akan menjadi kesalahan besar. Pada realita saat ini, politik klan bukannya dihilangkan malah melahirkan politik dinasti yang kian bertambah di suatu daerah sehingga terkadang tidak ada ruang bagi orang lain untuk bergabung dalam pemerintahan seperti yang terjadi di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

Menurut (Suyadi, at.al. 2020) Bentuk dan Karakter Politik kekerabatan di Indonesia menunjukkan bahwa lokalitas budaya dalam setiap daerah merupakan hal yang mempengaruhi bentuk dan karakter politik dinasti yang berlangsung di suatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut (Susi Asninda. At.al. 2018) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kepala desa di Desa muara kuis

dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan iklim desa yang partisipatis, merubah persepsi masyarakat dan membuat program yang melibatkan masyarakat. Adapun menurut Pajri, M. I., Mustiah, M., & Fuhaidah, U. (2020). bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan belum optimal, kendala yang di temukan terletak pada lemahnya fungsi pengawasan. Hal demikian disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang menduduki jabatan BPD tersebut. Dimana pada umumnya mereka tidak memahami tugas dan fungsinya sebagaimana yang di atur dalam UUD No. 6 Tahun 2014. BPD juga mendapatkan kendala di pengawasan kepala desa yang masih memakai rasa kekeluargaan, dimana hal seperti ini tidak boleh terjadi di dalam birokrasi pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terletak pada kekuatan kepala desa Merah Mata sebelumnya. Hubungan kekeluargaan yang erat antara kepala desa sebelumnya dengan kepala desa yang sekarang menyebabkan pembatasan kesempatan kepada orang lain untuk menduduki jabatan yang sama. Meskipun hal demikian menyalahi aturan yang berlaku tetapi realita tersebut masih berlangsung di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Praktik nepotisme tentu merugikan banyak pihak sebab proses pemilihan kepala desa tidak berlangsung secara adil dan tidak berdasarkan keahlian serta kompetensi orang yang akan menduduki jabatan tersebut. Praktik nepotisme merupakan tindakan yang dapat berdampak pada korupsi dan kolusi.

Politik dinasti merupakan suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik yang

bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Salah satunya praktek politik dinasti yang sedang berjalan saat ini dijumpai di Desa Wawasan, dimana telah terjadi upaya mempertahankan kekuasaan oleh keluarga kepala desa selama tiga periode. Mulai dari kepala desa sebelumnya pada tahun 2006 hingga yang sedang menjabat saat ini. Hubungan yang dimiliki kepala desa dengan mantan kepala desa sebelumnya ialah paman dan ayah, yang masih memiliki pengaruh di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Desa Wawasan, (2) Apa dampak politik dinasti dalam kepemimpinan desa bagi pembangunan masyarakat di Desa Wawasan. Untuk menjawab permasalahan diatas penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, serta warga masyarakat setempat. Adapun tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui: (1) Faktor penyebab terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Desa Wawasan. (2) Dampak politik dinasti dalam kepemimpinan desa bagi pembangunan masyarakat di Desa Wawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, faktor penyebab terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Desa Wawasan adalah sebagai berikut: (1) Kekuatan modal (ekonomi), dengan kekayaan yang dimiliki kepala desa sangat berpengaruh dalam masyarakat sebagai modal dasar untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan. (2) Jaringan keluarga, adanya pengaruh dari anggota keluarga seperti ayah dan paman,

ayahnya merupakan mantan kepala desa dan sekaligus tokoh agama. kepala desa mempertahankan kekuasaannya dengan cara menduduki jabatan penting di desa seperti perangkat desa (Kas Pemerintahan, Kaur Kesra, RT). (3) Demokrasi tidak sehat, berbagai cara ditempuh kepala desa untuk mempertahankan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya kecurangan seperti money politic pada saat kampanye berlangsung. Adapun dampak politik dinasti dalam kepemimpinan desa bagi pembangunan masyarakat di Desa Wawasan ialah sebagai berikut: (1) Penguasaan sumber ekonomi di desa. (2) Rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintahan desa yang menyebabkan faktor penentu kualitas pelayanan yang diberikan, seperti kurangnya perhatian bangunan pukesmas, rusaknya jembatan, pembuatan surat KK dan lain-lain Sri, P. (2018). Sedangkan menurut Michael, M., Haryadi, H., & Beriansyah, A. (2023) aktor kekuatan jaringan yang sudah dibangun sejak awal periode Agus Supriyanto, adanya kekuatan modal Ekonomi yang dimiliki cukup mumpuni dan adanya modal sosial yang mana Agus Supriyanto merupakan tokoh agama serta adanya kecurangan politik di pemilihan kepala desa. Dampak yang ditimbulkan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada kebijakan desa yang dilakukan Edoh. Sosialisasi mengenai pemilu dan kecurangan pemilihan umum atau pemilu diharapkan dilakukan agar dalam pemilu masyarakat dapat mengetahui mekanisme pelaporan.

Politik dinasti merupakan suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu: (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Desa Mekar Jaya, (2) Apa dampak politik dinasti dalam kepemimpinan desa bagi pembangunan masyarakat di Desa Mekar Jaya Lestariyono, W. (2022). Sedangkan menurut Keluarga Patjiddai dalam Pilkades berhasil tetap bertahan dalam Pemerintahan Desa Katumbangan .Penelitian ini bertujuan menganalisis pola dan penyebab sehingga Dinasti kepala desa bertahan pada satu keluarga meskipun pemilihan telah diadakan secara langsung dan terbuka bagi. Lokasi penelitian ini lokasi penelitian ini didesa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Penelitian kualitatif menggunakan studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Informan penelitian ini yakni kepala desa, tokoh masyarakat, Panitia Pilkades, ketua BPD dan penjabat desa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bertahanya dinasti Patjiddai dalam jabatan kepala desa pada pemerintah Desa Katumbangan karena adanya beberapa faktor pendukung yang sangat kuat dan solid dalam mempertahankan dinasti tersebut, untuk mempertahankan jabatan sebagai kepala desa, dinasti patjiddai pada proses Pilkades mengerakkan sumber daya yang benar-benar mendukung dengan sepenuh hati dan faktor ekonomi, serta sumber alam yang dikuasai oleh dinasti patjiddai. Keberhasilan dalam mempertahankan dinasti juga ditunjang oleh elit masyarakat desa katumbangan yang berhasil digerakkan untuk tetap mendukung calon dari keluarga patjiddai Pahrudin. P. (2018). Dinasti politik di dalam Pemilihan

Kepala Desa yang terjadi di Desa Banrimanurung terjadi karena telah mengakarnya sistem kerajaan yang telah lama berlaku di dalam sejarah perkembangan Indonesia, sebagai dampak dari berlakunya sistem kerajaan pada saat itu, masyarakat kemudian dibagi dalam tiga struktur sosial yaitu Karaeng, To maradeka, dan ata, pembagian struktur inilah yang kemudian masih dipercayai oleh masyarakat di Desa Banrimanurung dimana Karaeng di percayai sebagai kelompok yang terlahir sebagai pemimpin Pratama, G. (2020).

Kepemilikan modal ekonomi yang stabil secara finansial, memiliki modal sosial seperti jaringan yang kuat di kalangan masyarakat, memiliki modal simbolik yaitu marga siregar yang dikenal sebagai marga penguasa yang dominan sehingga jika dibandingkan dengan marga lainnya, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan marga siregar. Dampaknya kekuasaan hanya beredar di dalam keluarga itu sendiri, sehingga peluang/kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan haknya di bidang politik dan pemerintahan tidak diperoleh. Oleh karena itu politik dinasti akan sangat merugikan pihak lain dan berdampak pada sistem pemerintahan yang baik dan sistem demokrasi karena kesempatan bagi orang-orang yang mampu dan mampu tidak mendapatkan kesempatan dalam proses politik Siregar, M. T., Nasution, M. A., & Sihombing, M. (2021). kekuasaan di tingkat desa oleh sebuah kekuatan politik lama yang disebut dengan dinasti kepala desa. Dinasti Meidodga telah berkuasa di Desa Meidodga sejak tahun 1971 sampai saat ini secara terus menerus. Tiga generasi dari dinasti yang terdiri dari tiga kepala desa, secara bergantian telah mewarnai sejarah kepemimpinan di Desa Meidodga dalam kurun waktu kurang-lebih 48

tahun. Pemilihan kepala desa secara langsung yang telah ditegaskan dan diatur di dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mencabut pasal-pasal terkait dengan desa yang termuat di dalam undang-undang sebelumnya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari sebuah demokratisasi desa sebagai sub sistem Pemerintah Republik Indonesia yang terendah Shem, I. (2019).

Jaringan politik klan Kepala Desa di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dipengaruhi oleh tiga hal yakni hubungan kekeluargaan/ pertalian darah, stratifikasi sosial dan kekuatan modal. Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan masyarakat Jeneponto pada khususnya di Kec. Rumbia masih ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal perlapisan sosial. Kelompok masyarakat yang berada pada posisi teratas dalam stratifikasi sosial memiliki kekuatan yang dapat memengaruhi kelompok masyarakat lainnya. Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Rumbia, Para Kepala Desa yang masih dalam golongan kaum bangsawan ataupun biasa disebut Karaeng memanfaatkan posisinya sebagai kaum bangsawan ataupun Karaeng untuk membangun jaringan politik. Kekuatan modal yang dimiliki para Kepala Desa juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung jaringan politik klan mereka. Adapun dampak di timbulkan politik klan Kepala Desa terhadap perilaku politik masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto adalah tingkah laku kolektif / kerja sama warga dimanfaatkan oleh para Kepala Desa untuk memperoleh dukungan politik sehingga mampu meraih kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan mereka Haeruddin, Hannur (2017). Terbentuknya

dinasti politik tidak terlepas dari seseorang yang menjadi tokoh masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada penelitian ini keluarga Yasin merupakan segelintir orang yang memiliki pengaruh kuat di Kabupaten Bogor. Hal ini dapat terjadi karena keluarga Yasin memiliki latar belakang agama islam yang kuat. Kabupaten Bogor merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Nama besar keluarga Yasin serta kedekatan keluarga Yasin dengan para tokoh ulama menjadi pengaruh besar dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di Kabupaten Bogor Mawardi, F. I. (2021).

Sistem politik di suatu negara akan mengalami perkembangan, dinamika sistem politik di Indonesia sendiri telah mengalami pasang surut sejak zaman Bung Karno hingga era Reformasi. Reformasi sangat menjunjung tinggi masalah kebebasan dan HAM, namun kebebasan yang dijunjung tinggi tersebut justru memberikan ruang tumbuh praktik politik dinasti. Politik dinasti adalah suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elite politik tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan Hermansyah, F. (2017). kepemimpinan H. Teuku Zulkarnaini yang biasa disapa Ampon Bang mulai memimpin dari terbentuknya Kabupaten Nagari pada tahun 2002 dan memimpin kurang lebih 15 tahun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh Ampon Bang dalam setiap kegiatan politik yang terjadi antara lain, menempatkan kroni-kroninya di posisi strategis di pemerintahannya, membantu memenangkan adiknya TR Keumangan dalam pilkada serentak tahun 2017, mempromosikan dalam jabatan, mendoktrin PNS dan aparatur desa. Penulis memakai skripsi ini sebagai

rujukan dalam melihat fenomena dinasti politik (Ramadhan, I. 2018). elektabilitas Rachmat Yasin cukup tinggi, sehingga mempengaruhi tingkat popularitas Ade Munawaroh yang kemudian dikenal sebagai Ade Yasin. Hasil penelitian yang dilakukan pada april 2017 ini, dijadikan sebagai rujukan bagi tim pemenangan paslon Ade Yasin dan Iwan Setiawan untuk mengasosiasikan bahwa Ade Yasin merupakan adik atau saudara Rachmat Yasin dengan cara menambahkan nama Yasin dibelakang nama Ade. Penggantian nama Ade Yasin dilakukan dengan tujuan agar lebih populer di masyarakat. (Santoso, 2018:44).

Dinamika pola jaringan politik dinasti yang terjadi di Desa Merah Mata menarik untuk dikaji lebih lanjut. Telah hampir 20 tahun roda pemerintahan Kepala Desa Merah Mata di pimpin oleh keluarga yang sama dan diteruskan secara turun temurun kegenerasinya. Selain itu, pemilihan aparat desa juga dilaksanakan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Kepala Desa Merah Mata memberi andil yang besar terhadap dinamika politik di Desa Merah Mata sehingga terbentuk politik kekeluargaan atau politik dinasti dan tidak adanya oposisi sehingga Desa Merah Mata tidak ada kemajuan di bidang ekonomi. Berdasarkan pada fakta yang telah diperoleh sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa Di Desa Merah Mata di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin”.

METODOLOGI

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dimulai berdasarkan

lapangan dari lingkungan alami, data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, pengumpulan data dari informasi yang diperoleh, dalam perkataan yang tertulis maupun lisan dari seseorang atau pelaku yang dapat diamati dengan menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis. Tipe penelitian yang digunakan ialah studi kasus merupakan sebuah penelitian yang mengamati tentang kasus yang terjadi dalam kehidupan manusia, para peneliti mencoba untuk masuk ranah konsep substansi yang akan diteliti. Sehingga mereka akan paham seperti apa dan bagaimana pengertian yang dikembangkan oleh beberapa orang di diruang lingkup dalam kehidupan sehari-hari kemudian di deskripsikan dalam bentuk tulisan yang di kumpulkan berdasarkan kejadian yang terjadi dan objek penelitian penelitian yang berkaitan dengan Pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik dinasti dalam penelitian ini bermaksud untuk memaparkan politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah dinasti menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah oligarki politik. Dinasti di gambarkan sebagai suku yakni dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia, klan berarti anak. Sementara itu, istilah klan lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi sebagai analisis sistem kekeluargaan yang didefinisikan sebagai suatu kelompok sosial yang permanen berdasarkan keturunan langsung atau fiktif (dugaan) dari nenek moyang yang sama

1. Modal Ekonomi

Menurut Bourdieu (1926), bahwa modal ekonomi merupakan modal yang paling mudah dan dapat langsung ditukar dengan uang serta dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua macam modal ekonomi, yaitu uang yang berhubung dengan media pertukaran dan hak kepemilikan yang berhubung dengan barang modal fisik. Uang bukan modal dalam arti sebenarnya tetapi uang hanya merupakan sarana untuk dapat mengembangkan modal fisik dan modal manusia.

Modal ekonomi memiliki makna sebagai penggerak dan pelumas dalam mesin politik. Pada musim kampanye misalnya, kandidat membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhannya seperti biaya poster spanduk, membayar iklan, dan sebagainya. Demikian biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat Kepala Desa Merah Mata. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa proses politik pilkada membutuhkan biaya atau ongkos yang sangat mahal. Hal demikian menyebabkan munculnya tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal sebab kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang atau modal yang besar.

Modal ekonomi tergolong sangat penting dalam dunia pemerintahan. Terkadang, terdapat juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan modal yang lebih sehingga kepala desa tetap harus bertanggungjawab meskipun hal tersebut merupakan kepentingan publik. Jika ekonomi seorang kepala desa buruk, maka dapat memunculkan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang akibat ekonomi yang buruk adalah korupsi. erilaku korupsi merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan tetapi

memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Kepala Desa Merah Mata tergolong memiliki modal ekonomi yang stabil sehingga masyarakat tidak merasa khawatir. Selain itu, masyarakat berharap agar tupoksi Kepala Desa Merah Mata beserta aparatnya tetap dapat menjaga kepercayaannya.

2. Modal Kultural

Bourdieu (1926) mengungkapkan bahwa modal kultural merupakan representasi bentuk paling efektif dalam tranmisi modal kultural yang dapat dilihat melalui warisan karena sebagian besar hal tersebut tersembunyi dan dengan demikian kurang siap dikendalikan. Modal kultural adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti pengetahuan, keahlian, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi dan sebagainya.

Modal kultural tergolong penting tetapi tidak menjadi jaminan kesuksesan dalam suatu pemerintahan. Kesuksesan suatu pemerintahan dapat ditinjau dari personal pemimpin itu sendiri. Artinya, walaupun pemerintah memiliki pendidikan yang tinggi dan wawasan yang hebat tetapi tidak manfaatkannya dengan baik maka hal demikian akan sia-sia. Sebaliknya, jika seorang pemimpin hanya memiliki pendidikan yang rendah dan wawasan yang terbatas tetapi memanfaatkan jabatannya dengan bijak dan membumi maka semua masyarakat akan mengseganinya. Demikian dengan Kepala Desa Merah Mata, meskipun beliau hanya lulusan SMA tetapi beliau mampu memimpin Desa

Merah Mata dengan sangat baik. Kepala Desa Merah Mata dianggap telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kepala Desa Merah Mata di pandang memiliki pola kepemimpinan yang bijak dan

penampilan yang berkharisma serta berwibawa sehingga dihormati dan penuh daya tarik. Bagi masyarakat Desa Merah Mata, karakter dan kompetensi Kepala Desa Merah Mata jauh lebih penting sebab berdampak pada proses pengambilan keputusan strategik dan tolok ukur kesejahteraan. Dengan demikian, Kepala Desa Merah Mata dan aparatnya dapat lebih bijak dalam bertindak.

Modal kultur Kepala Desa Merah Mata masuk dalam kategori embodied state. Menurut Bourdieu (1926), bahwa embodied state adalah bentuk fisik dari suatu kultur yang melekat pada tubuh manusia dan secara keseluruhan menyatu dengan manusia sebagai satu kesatuan. Bentuk dari embodied state dapat berupa pola hidup, cara berbicara, cara berbusana dan kecenderungan-kecenderungan lain yang melekat pada individu sebagai pelaku social.

3. Modal Sosial

Menurut Bourdieu (1926), bahwa modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual, atau maya yang terdapat pada seseorang atau kelompok karena memiliki jaringan berupa timbal balik perkenalan dan pengakuan serta sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Kepala Desa Merah Mata memiliki modal sosial yang baik. Hal tersebut menjadi tekad beliau untuk berani mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Merah Mata. Hubungan sosial antara Kepala Desa Maggenrang dan masyarakat sudah tergolong dekat, tergambar dari keterlibatannya membuat dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Bahkan jauh sebelum menjadi kepala desa, beliau telah turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama.

Hasbullah (2006), mengungkapkan bahwa modal sosial adalah kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama

tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat.

Silaturahmi antara Kepala Desa Merah Mata dan masyarakat hingga saat ini masih sangat terjaga. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut, Kepala Desa Merah Mata berupaya membangun pondasi modal sosial dengan kokoh dan membentuk strategi dalam bentuk investasi baik pribadi ataupun kolektif guna mentransformasikan hubungan yang telah terbentuk. Kepala Desa Merah Mata juga tidak sungkan mengajak rakyatnya untuk bercanda gurau bersama. Selain itu, Kepala Desa Merah Mata memiliki pribadi yang menyenangkan dan kepedulian yang tinggi dibandingkan kepala desa sebelumnya.

4. Modal Simbolik

Bourdieu (1926), mengungkapkan bahwa model simbolik merupakan pengamplikasian simbol-simbol tertentu untuk meligitimasi pemilikan berbagai modal simbolik yang meliputi modal ekonomi, modal kultural dan modal sosial. Bourdieu juga mengatakan bahwa hubungan dan perpindahan kondisi sosial lebih kompleks daripada sekadar modal ekonomi, tetapi lebih berfungsi sebagai modal simbolik. Modal simbolik merupakan bentuk pengakuan dari kelompok, baik secara institusional ataupun non-institusional. Simbolik mampu menggiring orang lain untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang. Kepala Desa Merah Mata menganggap bahwa modal simbolik tergolong penting dalam dunia politik, tetapi kurang penting dalam dunia pemerintahan. Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang meliputi pembuatan keputusan. Politik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan

meningkatkan partisipasi terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Masyarakat Desa Merah Mata menilai seorang pemimpin bukan dari apa yang dimiliki tetapi apa yang mampu dilakukan untuk desa dan masyarakat. Bagi masyarakat Desa Merah Mata, modal simbolik tidak memberikan jaminan kesejahteraan sehingga tidak tergolong sebagai hal yang penting. Masyarakat memandang bahwa teladan yang dicerminkan oleh seorang kepala desa jauh lebih penting.

Selain itu, Kepala Desa Merah Mata memiliki sikap yang bijak, kebiasaan yang baik dan kinerja serta kreativitas yang tinggi dalam memimpin. Kepala Desa Merah Mata saat ini termasuk sukses dalam mengelola pemerintahan Desa Merah Mata. Meskipun tergolong kurang dalam modal simbolik tetapi beliau mampu jauh lebih berhasil dari kepala desa sebelum-sebelumnya. Kesuksesan tersebut diperoleh dari kerjasama yang terjalin antara aparat dan masyarakat sekitar.

5. Dampak Jaringan Politik Dinasti

Politik dinasti merupakan serangkaian politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tetapi berada pada pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah dimiliki kepada orang lain yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Terbentuknya politik dinasti disuatu daerah seharusnya dihilangkan sebab politik dinasti merupakan suatu permasalahan yang berdampak pada sistem politik yang ada, terutama pada bagian akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan serta hanya melahirkan sebuah keuntungan untuk satu kelompok kepentingan dan merugikan kelompok lainnya.

Berdasarkan penelitian menggunakan indikator dari Bourdieu (1926) yang meliputi modal ekonomi, modal kultural, modal sosial dan modal simbolik ditemukan

bahwa politik dinasti lahir dari modal-modal tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa Kepala Desa Merah Mata memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa sebelumnya sehingga menjadi salah satu alasan beliau melanjutkan tongkat estafet pemerintahan selanjutnya. Hal ini tentu tergolong dalam politik dinasti.

Keluarga politik atau politik dinasti merupakan kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan oleh kelompok keluarga yang masih terikat hubungan darah dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Artinya, system pemerintahan di Desa Merah Mata masih mirip dengan pergantian pemerintahan dalam kerajaan sebab kekuasaan diwariskan kepada keluarga selanjutnya guna menjaga kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarganya. Pemerintahan demikian di Desa Merah Mata telah berlangsung sejak 20 tahun lalu. Dampak yang ditimbulkan dari dinasti politik di Desa Merah Mata yakni pembatasan kesempatan bagi orang lain untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Merah Mata. Hal demikian tentu tidak adil dan meredupkan karakter serta kompetensi yang layak dalam menduduki jabatan tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang diperoleh terkait pola Jaringan Politik Dinasti Kepala Desa Di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, disimpulkan bahwa: 1) Modal Ekonomi: Kepala Desa Merah Mata memiliki modal ekonomi yang stabil, namun memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala desa sebelumnya sehingga tergolong dalam politik dinasti, 2) Modal Kultural: Karakter dan kompetensi Kepala Desa Merah Mata jauh lebih penting sebab berdampak pada proses pengambilan keputusan

dan tolok ukur dalam bertindak, 3) Modal Sosial: Kepala Desa Merah Mata memiliki modal sosial yang baik, nampak pada peran beliau dalam membuat dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, dan 4) Modal Simbolik: Kepala Desa Merah Mata memiliki modal simbolik yang tergolong kurang tetapi beliau mampu mensejahterakan rakyatnya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari dinasti politik di Desa Merah Mata yakni pembatasan kesempatan bagi orang lain yang lebih layak untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Merah Mata..

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Penelitian dan pulikasi yang dilakukan. Terutama, Warga Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin yang telah meluangkan waktu.

REFERENSI

- Asnida, S., Marlina, S., & Mubarak, H. (2018). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Doctoral dissertation, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI).
- Cam, G. (1996). Bothwell, Austin." Shackles." Rev. of Shackles, by Madge Macbeth. Canadian Bookman (Oct. 1926): 24. Bourdieu, Pierre. Laneuaee and Symbolic Power. Tram Gino Raymond and Matthew Adamson. Cambridge: Harvard UP, 1994. Bourinot, Arthur S." A Few Book Notes." Canadian Author and Bookman 30.4. NOTE TO USERS, 169.
- Hermansyah, F. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(02).
- Haeruddin, Hannur (2017) Analisis Pola Jaringan Politik Klan Kepala Desa di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Undergraduate (SI) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lestario, W. (2022). Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa. *Jurnal Sociopolitico*, 4(1), 49-57.
- Mawardi, F. I. (2021). Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah Di Kabupaten Bogor (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Michael, M., Haryadi, H., & Beriansyah, A. (2023). Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa (Studi Kasus di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Pajri, M. I., Mustiah, M., & Fuhaidah, U. (2020). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Di Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Pahrudin, P. (2018). Dinasti Politik Pemerintah Desa Di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Arajang*, 1(1), 36-44.
- Pratama, G. (2020). Dinasti politik dalam pemilihan kepala desa banrیمانurung kecamatan bangkala barat kabupaten jeneponto (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ramadhan, Ilham. (2018). "Politik Dinasti di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya)." Skripsi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Desember 2018)

- Rozali, (2015) Fenomena Dinasti Politik Pemerintahan Desa, Tanjung Pinang: Jurnal Il mu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Santoso, Hudi. (2018). “Saluran Media Politik Dinasti Yasin Dalam Pilkada Kabupaten Bogor” Jurnal MetaKom, Vol. 2 No. 1 Maret 2018
- Shem, I. (2019). Dinasti Politik Kekerabatan (Studi Kasus Di Kampung Meidodga Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak) (Doctoral dissertation, STPMD" APMD" Yogyakarta).
- Siregar, M. T., Nasution, M. A., & Sihombing, M. (2021). Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. *PERSPEKTIF*, 10(2), 678-691.
- Suyadi, N. (2014). Bentuk Dan Karakter Politik Dinasti Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga).
- Sri, P. (2018). Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa (Studi di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)..